



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR-RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 2
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat / Ke-	: Rapat Kerja / ke-1
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Menteri Hukum dan HAM RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 11 September 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. Ir. H.M. Ali Taher, SH., M.Hum.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H.
Acara	: Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Hadir	: ... orang dari 48 orang Anggota Komisi VIII DPR-RI <ol style="list-style-type: none">Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI beserta jajarannya;Menteri Kesehatan RI atau yang mewakili beserta jajarannya;Menteri Sosial RI atau yang mewakili beserta jajarannya;

- d. Menteri Dalam Negeri RI atau yang mewakili beserta jajarannya;
- e. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI atau yang mewakili beserta jajarannya;
- f. Menteri Hukum & HAM RI atau yang mewakili beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja pada pukul 10.40 WIB.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, SH., M.Hum. pada tempat dan sesuai acara tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Menteri Hukum dan HAM RI** dengan agenda **“Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
2. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori Tetap, Usulan Baru, Perubahan Susbtansi dan Penghapusan Pasal/Ayat, akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja).
3. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori perubahan redaksional akan dibahas di Tim Perumus yang selanjutnya diserahkan ke Panja.
4. Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati pembentukan Panja RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

ttd

Dr. H.M. ALI TAHER, SH. M.Hum.